

LAPORAN BERKALA

PENGELOLAAN RISIKO

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TRIBULAN III TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko merupakan kata yang kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut.

Risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni yaitu risiko dengan kemungkinan kerugian tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, dan risiko spekulatif yaitu risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Di samping kategorisasi murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko dinamis yang muncul dari perubahan kondisi tertentu (perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, yang dapat memunculkan jenis-jenis risiko baru) dan risiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu (secara praktis risiko tidak berubah dari waktu ke waktu). Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Ada beberapa definisi dari manajemen risiko organisasi/perusahaan pada umumnya, diantaranya:

1. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg, *The Practice of Risk Management*, Euromoney Book, 2004)

2. *Enterprise Risk Management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Lam, James, *Enterprise Risk Management*, Wiley, 2004)

3. *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup

pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. (COSO, COSO Enterprise Risk anagement - Integrated Framework. COSO, 2004).

Sedangkan menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengembangan budaya sadar Risiko, pembentukan struktur Manajemen Risiko, dan penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Pengembangan Budaya sadar Risiko dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mencapai sasaran organisasi, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/ atau pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi.

Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk terdiri atas Unit Pemilik Risiko yang (UPR) merupakan unit pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Proses Manajemen Risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi unit, Unit kepatuhan Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari perumusan sistem Manajemen Risiko, proses Manajemen Risiko, dan monitoring dan evaluasi sistem Manajemen Risiko.

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan diterapkan secara periodik selama 1 (satu) tahun dan terdiri atas tahapan yaitu komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, pemantauan dan *review*.

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR). Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko, besaran/Level Risiko Residual, Harapan, keputusan mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Mitigasi Risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga Besaran dan atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Pemantauan dan *Review* bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan dan review Risiko dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Proses Manajemen

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari manajemen risiko pada intinya adalah pengelolaan risiko untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan meningkatkan kemungkinan pencapaian

visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja dan melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Struktur manajemen risiko menunjukkan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam pengelolaan risiko di organisasi. Serangkaian proses dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi manajemen risiko. Di lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen risiko juga telah didukung dengan perangkat aturan yang sesuai dengan standar manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya dengan selalu memperhatikan situasi terkini dan ketidakpastian di masa mendatang, selain juga dari sasaran organisasi yang telah ada, sehingga identifikasi risiko dalam organisasi dapat lebih beragam dan lebih banyak kategori risiko. Hal ini dapat turut berperan dalam mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sejak dini dan memberi kesempatan untuk mengelola risiko tersebut sebelum membesar.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

REGISTER RISIKO STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Kematian Ternak	RSO.25.27.31.01	Kepala Dinas	Wabah penyakit hewan, kurangnya bibit unggul, ketersediaan pakan terbatas	Eksternal & Internal	UC	Penurunan angka populasi ternak, terganggunya kontinuitas produksi peternakan	Peternak, Konsumen, Dinas
2	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Angka Kesakitan Tinggi	RSO.25.27.31.01	Kepala Dinas	Kualitas pakan rendah, manajemen pemeliharaan belum optimal, layanan teknis terbatas	Internal	C	Produksi hasil ternak menurun, mengurangi pendapatan peternak	Peternak, Dinas
3	Indeks yang Diterima Peternak (It)	Pendapatan peternak stagnan atau menurun	RSO.25.27.31.03	Kepala Dinas	Harga jual ternak rendah, biaya produksi tinggi, kurangnya akses pasar	Eksternal	UC	Daya beli peternak menurun, berisiko menurunkan keberlanjutan usaha peternakan	Peternak, Pemerintah Daerah

4	Indeks yang Diterima Peternak (It)	Terbatasnya akses peternak terhadap pembiayaan dan subsidi	RSO.25.27.31.04	Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi program, syarat administrasi sulit	Internal	C	Peternak kesulitan meningkatkan skala usaha dan mengakses teknologi	Peternak, Koperasi, Dinas
5	Indeks yang Diterima Peternak (It)	Fluktuasi harga pakan dan input produksi lainnya	RSO.25.27.31.05	Kepala Dinas	Ketergantungan impor bahan baku pakan, inflasi	Eksternal	UC	Menurunnya margin usaha peternakan, potensi penurunan populasi ternak	Peternak, Pelaku Pasar Ternak

REGISTER RISIKO OPERASIONAL
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Implementasi	Risiko Kepatuhan: Sarana pertanian tidak digunakan sesuai aturan	ROO.25.27.31.03	Kabid PPHP	Lemahnya pengawasan lapangan	Internal	C	Penurunan kualitas hasil produksi peternakan	Petani, Dinas
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Jumlah Pengelolaan SDG	Perencanaan	Risiko Kebijakan: Tidak adanya pemetaan dan pendataan SDG secara menyeluruh	ROO.25.27.31.01	Kabid Budidaya	Minimnya data awal dan koordinasi	Internal	C	Kehilangan potensi lokal SDG	Dinas, Peneliti

3	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan	Pengawasan	Risiko Operasional Kegiatan: Obat ilegal atau kadaluarsa masih beredar	ROO.25.2 7.31.02	Kabid Keswa n	Kurangnya inspeksi berkala	Internal	C	Bahaya bagi hewan dan masyarakat	Peternak, Konsumen
4	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit dan Pakan	Jumlah Pengawasan Benih/Bibit & Pakan	Implementasi	Risiko Kepatuhan: Produk yang beredar tidak tersertifikasi	ROO.25.2 7.31.01	Kabid Budida ya	Proses verifikasi tidak optimal	Internal	C	Penurunan mutu bibit dan pakan	Peternak, Konsumen
5	Penyediaan Benih/Bibit dan Pakan Ternak antar Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan antar Daerah	Monitoring	Risiko Kemitraan: Tidak adanya kontrol kualitas saat distribusi	ROO.25.2 7.31.01	Kabid Budida ya	Kurangnya pengawasan daerah asal	Eksternal	UC	Bibit berkualitas rendah tersebar	Peternak, Pemerintah Daerah
6	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun	Implementasi	Risiko Kemitraan: Terlambat atau tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.2 7.31.02	Kabid Keswa n	Kontraktor tidak profesional	Eksternal	C	Pemborosan anggaran, manfaat tidak optimal	Dinas, Masyarakat
7	Penjaminan Kesehatan Hewan & Wabah	Jumlah Penjaminan dan Penutupan/Pembukaan Daerah Wabah	Implementasi	Risiko Kebijakan: Respon lambat terhadap kasus penyakit	ROO.25.2 7.31.02	Kabid Keswa n	Tidak ada SOP darurat	Internal	C	Penyebaran wabah ke wilayah lain	Peternak, Masyarakat

8	Pengawasan Pemasukan & Pengeluaran Hewan/Produk	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran	Pengawasan	Risiko Kepatuhan: Ternak keluar/masuk tanpa izin resmi	ROO.25.2 7.31.02	Kabid Keswa n	Lemahnya koordinasi dan pengawasan	Internal	C	Penyebaran penyakit antar wilayah	Peternak, Dinas
9	Pengelolaan Jasa Lab dan Medik Veteriner	Jumlah Pengelolaan Jasa Laboratorium & Medik Veteriner	Monitoring	Risiko Operasional Kegiatan: Layanan tidak standar/memadai	ROO.25.2 7.31.02	Kabid Keswa n	Sarpras laboratorium belum optimal	Internal	C	Hasil diagnosis tidak akurat	Dinas, Peternak
10	Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet	Pengawasan	Risiko Kepatuhan: Tidak semua pelaku usaha patuh	ROO.25.2 7.31.04	Kabid Kesma vet	Kurangnya edukasi dan sanksi	Internal	C	Konsumsi produk hewan tidak aman	Konsumen, Peternak
11	Pengawasan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	Implementasi	Risiko Kepatuhan: Praktek peternakan tidak sesuai kaidah kesejahteraan hewan	ROO.25.2 7.31.04	Kabid Kesma vet	Lemahnya pemahaman pelaku usaha	Internal	C	Penurunan kualitas produk & pencitraan buruk	Peternak, Konsumen
12	Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Penanggulangan Bencana Pertanian	Perencanaan	Risiko Kebijakan: Tidak ada rencana kontinjensi saat bencana	ROO.25.2 7.31.03	Kabid PPHP	Tidak tersedia data risiko bencana	Internal	C	Kerusakan aset peternakan dan kerugian besar	Peternak, Dinas

13	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha yang Diterbitkan	Pengawasan	Risiko Kecurangan (Fraud): Penerbitan izin tidak sesuai prosedur	ROO.25.2 7.31.03	Kabid PPHP	Intervensi atau nepotisme	Internal	C	Timbul konflik kepentingan dan ketidakadilan	Dinas, Masyarakat
14	Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer	Implementasi	Risiko Kepatuhan: Izin diberikan pada pihak yang tidak memenuhi syarat	ROO.25.2 7.31.03	Kabid PPHP	Pemeriksaan tidak detail	Internal	C	Obat disalahgunakan dan membahayakan	Peternak, Konsumen
15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Ternak yang Mengikuti Penyuluhan	Implementasi	Risiko Kemitraan: Partisipasi rendah dalam penyuluhan	ROO.25.2 7.31.03	Kabid PPHP	Minimnya motivasi dan waktu peternak	Eksternal	UC	Pengetahuan peternak tetap rendah	Peternak, Masyarakat

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hambatan yang dialami selama pelaksanaan pengelolaan risiko Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 Tribulan 3 antara lain:

- a. Pelaksanaan yang tumpang tindih dengan kegiatan lainnya
- b. Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan risiko
- c. Volume pekerjaan yang cukup banyak sehingga pelaksanaan pengelolaan risiko kurang maksimal.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:					
1	Penguatan surveilans & vaksinasi, Program distribusi bibit unggul, Optimalisasi distribusi & subsidi pakan ternak	Monitoring capaian populasi melalui laporan bulanan, Supervisi lapangan terhadap pelaksanaan vaksinasi dan distribusi bibit	Kepala Bidang Keswan & Budidaya	Bulanan, mulai Juli – Desember 2025	Juli-September 2025
2	Peningkatan pelatihan teknis peternak, Pendampingan pemeliharaan terpadu, Revitalisasi layanan penyuluhan	Evaluasi efektivitas pelatihan dan penyuluhan, Kuesioner kepuasan peternak terhadap layanan teknis	Kepala Bidang Budidaya	Triwulanan, Agustus – Desember 2025	Agustus 2025
3	Pengembangan kemitraan pemasaran, Fasilitasi pasar ternak & digitalisasi penjualan, Subsidi harga produksi secara selektif	Monitoring tren pendapatan peternak (data It), Evaluasi hasil kemitraan dan efektivitas pasar digital	Kepala Bidang PPHP	Juli, September, dan November 2025	Juli, September 2025
4	Sosialisasi aktif dan masif, Penyederhanaan syarat administrasi, subsidi, Kolaborasi dengan koperasi dan BUMDes	Laporan mingguan pelaksanaan sosialisasi, Audit dokumen syarat subsidi dan data penerima	Kabid PPHP	Juli – Oktober 2025	Juli 2025
5	Diversifikasi bahan baku lokal (fermentasi hijauan/limbah agroindustri), Monitoring harga & penyediaan pakan murah, Advokasi ke pusat untuk harga stabil	Pemantauan harga pakan via sistem informasi pasar, Review ketersediaan bahan pakan lokal	Kepala Bidang Budidaya	Bulanan, Juli – Desember 2025	Juli - September Tahun 2025
Risiko Operasional OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan:					
1	Penjadwalan pengawasan terpadu, Sanksi bagi pelanggaran penggunaan sarana	Supervisi lapangan dan cek silang hasil pengawasan	Kabid PPHP	Triwulanan	September 2025
2	Penyusunan sistem database SDG, Koordinasi dengan perguruan tinggi/litbang	Verifikasi laporan SDG dan cek lapangan keberadaan SDG	Kabid Budidaya	Semesteran	-
3	Inspeksi berkala ke pengecer, Pelaporan wajib stok obat aktif	Inspeksi mendadak ke pengecer dan review stok obat	Kabid Keswan	Bulanan	Juli - September Tahun 2025

4	Audit legalitas produk secara berkala, Pelatihan verifikator mutu	Audit dokumen sertifikasi dan uji sampel benih/pakan	Kabid Budidaya	Triwulanan	September 2025
5	MoU mutu antar daerah, Tim uji mutu acak saat penerimaan	Pemeriksaan silang dengan dinas kabupaten/kota pengirim	Kabid Budidaya	Setiap distribusi	September 2025
6	Supervisi teknis proyek berkal, Sanksi tegas dalam kontrak	Review fisik prasarana dan laporan pelaksanaan	Kabid Keswan	Setelah pembangunan selesai	-
7	Penyusunan SOP tanggap darurat- Pelatihan simulasi wabah	Simulasi SOP darurat dan audit kesiapan respons	Kabid Keswan	Dua kali setahun	-
8	Pembentukan pos check-point bersama, Digitalisasi surat jalan	Audit data keluar/masuk dan kroscek lapangan	Kabid Keswan	Bulanan	Juli - September Tahun 2025
9	Pengadaan alat uji baru, Sertifikasi teknisi laboratorium	Kalibrasi alat laboratorium dan audit layanan	Kabid Keswan	Triwulanan	September 2025
10	Edukasi masif lewat kelompok usaha, Penerapan sanksi administratif	Survei kepatuhan pelaku usaha dan inspeksi teknis	Kabid Kesmavet	Triwulanan	September 2025
11	Pelatihan dan supervisi peternak besar, Sosialisasi panduan kesejahteraan hewan	Penilaian lapangan atas kesejahteraan hewan dan pendampingan teknis	Kabid Kesmavet	Setiap penerbitan izin	September 2025
12	Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi, Simulasi respons bencana	Pemutakhiran peta risiko bencana dan simulasi penanggulangan	Kabid PPHP	Semesteran	September 2025
13	Pengawasan lintas tim, Aplikasi digital untuk transparansi proses	Audit proses penerbitan izin dan pelaporan indikasi kecurangan	Kabid PPHP	Triwulanan	September 2025
14	Audit lapangan acak, Checklist digital terpadu	Verifikasi lapangan dan audit administrasi pemohon	Kabid PPHP	Setiap permohonan diterima	September 2025
15	Penyesuaian jadwal penyuluhan, Penyuluhan daring dan fleksibel	Survei evaluasi pasca-penyuluhan dan monitoring perubahan praktik peternak	Kabid PPHP	Setelah penyuluhan	September 2025

V. PENUTUP

Pengelolaan risiko adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Setiap OPD harus siap untuk menyesuaikan strategi seiring dengan perubahan dalam lingkungan kinerja dan risiko yang mungkin muncul.

Pelaksanaan pengelolaan risiko di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu perbaikan dan penguatan di berbagai hal. Sehingga diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menekan adanya kemungkinan risiko yang muncul dan bisa mengelolanya dengan baik.